

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan. Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11-13 April 1999 di Pangkalan Kerinci.

Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini. Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 Km, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa Pulau Besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-pulau kecil lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sampai akhir 2010 adalah sebanyak 311.726 jiwa atau 80.964 KK yang terdiri dari berbagai macam etnis budaya. Di Kabupaten Pelalawan terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggir Sungai, ada juga di Perkebunan, dan Transmigrasi, serta 12 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan kecamatan yang paling kecil adalah Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan adalah Ibukota Kecamatan yang mempunyai jarak terdekat dengan ibukota kabupaten yaitu 1Km sedangkan jarak terjauh dari ibukota Kabupaten adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar yaitu Desa Teluk Dalam. Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintang Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat.

Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Propinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000. Dengan

terbentuknya Legislatif (DPRD) Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang Paripurna, terpilihlah pasangan T.Azmun Jaafar, SH dengan ABD.Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut terbentuk DPRD Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan No.KPTS.508/VIII/2004 tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004 – 2009 yang diresmikan pengangkatannya.

Setahun setelah Pemilihan Anggota DPRD tepatnya tanggal 8 Februari 2006 diadakan pemilihan Bupati / Wakil Bupati secara langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T.Azmun Jaafar dengan Rustam Effendi yang kemudian di kukuhkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131-14-94 Tahun 2006 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau. Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera, dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian Hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka. Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara $1^{\circ}25''$ LU dan $0^{\circ},20''$ LS serta antara $100^{\circ},42''$ ~ $103^{\circ},28''$ BT dengan batas-batas wilayah:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Siak
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir

3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau

Pemilukada tahap kedua di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011. Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tanggal 20 Februari 2011 ditetapkan pasangan HM Harris dan Marwan Ibrahim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2011-2016.

1. Profil Wilayah Kabupaten Pelalawan

Luas kabupaten Pelalawan adalah 1.392.494 Ha atau 14,73 % dari luas wilayah Propinsi Riau (9.456.160 Ha).Secara geografis, Pelalawan berada di $00^{\circ} 46,24'$ LU sampai $00^{\circ} 24,34'$ LS dan $101^{\circ} 30,37'$ BT sampai dengan $103^{\circ} 21,36'$. Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan, dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan dataran, sedangkan perairan terdiri dari Sungai, dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, diantaranya Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebu, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil, seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu.

a. Batas Administratif

Batas administratif Kabupaten Pelalawan, yaitu sebelah Utara dengan Kabupaten SiakSebelah Selatan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu

Sebelah Timur dengan Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepri dan Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan:

1. Langgam, luas 144.245,09 Ha
2. Bunut, luas 40.802,77 Ha
3. Pangkalan Kuras, luas 118.388,79 Ha
4. Kuala kampar, luas 150.265,19 Ha
5. Pangkalan Kerinci, luas 19.355,53 Ha
6. Ukui, luas 129.956,06 Ha
7. Pelalawan, luas 149.811,31 Ha
8. Pangkalan Lesung, luas 50.485,12 Ha
9. Kerumutan, luas 96.003,66 Ha
10. Teluk Meranti, luas 423.984,41 Ha
11. Kecamatan Bandar Petalangan, Luas 37.255,16 Ha
12. Kecamatan Bandar Sekijang, Luas 31.941,2 Ha

Sebagian besar dataran wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian lagi merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi. Secara umum ketinggian beberapa daerah/kota berkisar antara 3-6 meter dengan kemiringan lahan rata-rata \pm 0-15% dan 15-40 %. Daerah/kota yang tinggi adalah Sorek I Kecamatan Pangkalan Kuras dengan ketinggian \pm 6 meter dan yang terendah adalah Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar dengan ketinggian \pm 3,5 meter.

Di wilayah Kabupaten Pelalawan dialiri sebuah Sungai Kampar dengan ratusan anak sungai. Panjang Sungai Kampar \pm 413,5 km, dengan kedalaman rata-rata \pm 7,7 meter, lebar rata-rata 143 meter. Sungai ini dan anak-anak sungainya berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budidaya perikanan dan irigasi. Wilayah dataran rendah kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan dataran rawa gambut, dataran aluvium sungai dengan daerah dataran banjirnya.

Dataran ini dibentuk oleh endapan aluvium muda dan aluvium tua terdiri dari endapan pasir, danau, lempung, sisa tumbuhan dan gambut. Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh iklim, keadaan ortografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan pada tahun 2010 berkisar antara 127,8 mm sampai 318,3 mm. Suhu dan kelembaban udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2010 suhu udara rata-rata pada siang hari berkisar antara 33,0-35,4 derajat celsius, sedangkan pada malam hari berkisar antara 20,5-23,2 derajat celsius. Suhu udara maximum 35,4 derajat celsius terjadi pada bulan mei 2010, sedangkan suhu udara minimum terendah 20,5 derajat celsius terjadi pada bulan juli 2010. Sedangkan rata-rata kelembaban udara selama tahun 2010 berkisar antara 78-83 persen.

b. Penduduk

Penduduk di Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 adalah sebanyak 321.947 jiwa yang terdiri dari 169.282 jiwa penduduk laki-laki dan

152.665 jiwa penduduk perempuan. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan jumlah penduduk 73.078 jiwa dan Kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Bunut dengan jumlah penduduk 12.125 jiwa.

c. Tenaga Kerja

Masalah Kependudukan selalu berkaitan dengan ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup dan memadai akan meningkatkan pengangguran. Pada tahun 2010 pencari kerja yang mendaftar di Disnaker Kabupaten Pelalawan berjumlah 3.708 orang. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pencari kerja yang terdaftar adalah tamatan SMU atau sederajat 1.382 orang.

d. Tenaga Kerja

Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah Minimum Kabupaten Pelalawan (UMK) yang merupakan salah satu pertimbangan penting bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang mau mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi Upah Minimum Kabupaten (UMK) suatu daerah memberikan gambaran semakin tinggi tingkat ekonominya.

e. Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Secara umum kondisi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan semakin tingginya harga berbagai macam kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Upah Minimum sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Pertanian Tanaman Karet Propinsi Riau Tahun 2011 sebesar Rp.1.234.000,- Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 49 Tahun 2010 Tanggal 30 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 sebesar Rp. 1.128.000,- Di Kabupaten Pelalawan Penduduknya merupakan Penduduk yang heterogen yang terdiri dari berbagai jenis suku dan bahasa. Namun walaupun merupakan masyarakat yang heterogen penduduk yang ada di Kabupaten Pelalawan baik penduduk asli maupun para pendatang hidup dalam lingkungan yang harmonis. Suku yang utama yang terdapat di Kabupaten Pelalawan adalah suku Melayu, sedangkan suku pendatang yang ada di Kabupaten Pelalawan ini cukup banyak yaitu suku Minang, suku Batak, suku Aceh, suku Jawa, suku Sunda, Banjar dan Bugis. Di Kabupaten Pelalawan ini juga terdapat suku asli pedalaman yaitu suku Mamak, suku Laut dan Suku sakai.

2. Kependudukan

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 berjumlah 321.947 orang, terdiri dari 169.282 orang laki-laki (52,58 persen) dan 152.665 orang perempuan (47,42 persen). Dibandingkan dengan jumlah

penduduk pertengahan tahun 2002, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sebanyak 179.199 orang yang terdiri dari 52,60 persen (94.265 orang) laki-laki dan 47,40 persen (84.934 orang) perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2002 dan pertengahan tahun 2011 berturut-turut adalah 179.199 dan 321.947 jiwa. Sehingga laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam kurun waktu 2002—2011 adalah 6,73 persen. lonjakan jumlah penduduk mulai terjadi setelah pemekaran Kabupaten Pelalawan yang terpisah dari induknya Kabupaten Kampar. Sehingga jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya saja, Kabupaten Pelalawan terus berkembang sebagai kabupaten baru.

b. Sebaran Penduduk

Salah satu ciri demografi Indonesia adalah sebaran penduduk yang tidak merata, hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Pelalawan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Pelalawan berdomisili di ibukota kabupaten, sisanya menyebar di kecamatan-kecamatan lainnya. Sebanyak 76.884 jiwa penduduk tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, setara dengan 23,88 persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Pelalawan. Sementara kecamatan yang paling sedikit dihuni penduduk adalah kecamatan Bunut, sebanyak 3,90 persen sejumlah 12.505 jiwa.

c. Rata-rata Anggota Rumah Tangga

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 sebanyak 83.648 rumah tangga. Rumah tangga terbanyak di Kecamatan

Pangkalan Kerinci sebanyak 20.682 rumah tangga kemudian Pangkalan Kuras sebanyak 12.427 rumah tangga. Sementara rumah tangga paling sedikit di Kecamatan Bunut sebanyak 3.311 rumah tangga. Rata-rata jiwa per rumah tangga di Kabupaten Pelalawan sebesar empat jiwa per rumah tangga. Dilihat menurut kecamatan, semua kecamatan di Kabupaten Pelalawan mempunyai rata-rata jiwa per rumah tangga sebesar empat orang di setiap kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

d. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 sebesar 111. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kondisi rasio jenis kelamin lima tahun yang lalu, tahun 2002 juga mempunyai besaran yang sama yaitu 111. Kecamatan Ukui memiliki rasio jenis kelamin terbesar bila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Pelalawan, yaitu sebesar 116. Sedang kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terkecil adalah Kecamatan Bandar Petalangan, yaitu sebesar 106 yang mencerminkan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang di Kecamatan Bandar Petalangan.

e. Kepadatan Penduduk

Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan 13.924,94 km² dengan kepadatan penduduk pertengahan tahun 2002 adalah 14 jiwa per km kemudian pada pertengahan tahun 2011 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 23 jiwa per km². Dari dua belas kecamatan di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Teluk

Meranti merupakan kecamatan terluas yaitu mencapai 4.239,84 km² atau 30,45 persen dari luas wilayah Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi dilihat dari jumlah Penduduk pertengahan tahun 2011, Kecamatan Teluk Meranti baru dihuni oleh 14.414 orang penduduk dengan kepadatan penduduk tiga orang per km². Hal tersebut menjadikan Kecamatan Teluk Meranti sebagai kecamatan dengan penduduk terjarang di Kabupaten Pelalawan. Sebaliknya Kecamatan Pangkalan Kerinci yang wilayahnya terkecil yaitu seluas 193,56 km² menjadi kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 397 orang per km² dan jumlah penduduk sebesar 76.884 orang.

f. Kelompok Umur

Kabupaten Pelalawan memiliki jumlah penduduk terbesar pada kelompok usia produktif. Dari 321.947 jiwa penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011, sebanyak 206.696 jiwa (64,20 persen) merupakan penduduk dengan usia 15—64 tahun. Sedangkan penduduk menurut kelompok umur yang jumlahnya paling kecil adalah penduduk berusia 65 tahun lebih atau penduduk usia tidak produktif, yaitu sebesar 1,55 persen (4.991 jiwa).

3. Masyarakat Adat Petalangan

Masyarakat adat petalangan adalah kelompok masyarakat yang memiliki dukungan historis serta keberadaannya tidak diragukan. Menurut toambo, mereka berasal dari Johor menggunakan perahu, dan membuka hutan di pemukiman mereka sekarang ini. Mereka menjadi kawula Kerajaan Kampar

yang sekarang lebih dikenal dengan Pelalawan. Di bawah pemerintahan Kesultanan Pelalawan mereka mendapat pengakuan hak atas wilayah hutan mereka (Hutan Tanah Perbatinan Kurang Satu Tiga Puluh), yang dipimpin oleh kepala adat yang dikenal dengan sebutan batin. Hak perlindungan hukum atas hukum adat dan tanah adat pada masyarakat Petalangan telah mendapat legitimasi. Hak ini terbukti dengan diterbitkan Surat Keterangan Hutan Tanah (Grand Sultan) bagi masyarakat adat yang memiliki tombo atau terombo.

Secara sosiologis empiris keberadaan masyarakat adat Petalangan tidak terbantahkan, mereka hidup berpuluh tahun bahkan beratus tahun dalam lingkungan yang ditopang oleh dukungan sumber daya alam yang berlimpah. Mereka memiliki otoritas wilayah berupa tanah, hutan dan air yang didalamnya kaya akan sumber penghidupan. Terdapat pengaturan dalam sebuah tatanan hidup baik berlaku bagi pribadi, kelompok bahkan untuk masyarakat luar tentang pemanfaatan kekayaan yang berada dalam wilayah yang diakui sebagai milik turun temurun. Mereka miliki sistem hidup dalam sebuah naungan hukum adat, pola kepemimpinan, bahasa, agama dan banyak yang lainnya. Masyarakat Petalangan mempunyai pengaturan mengenai Fungsi, Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Tanah. Ketetapan inilah yang dipegang teguh oleh masyarakat Petalangan sampai kerajaan berakhir sebagai konsekwensi diterimanya kemerdekaan Indonesia dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semasa awal kemerdekaan, eksistensi Persekutuan Hukum Adat dan hak ulayat ini memiliki peran dalam penentuan batas wilayah kecamatan, yang pada awalnya wilayah

Masyarakat Petalangan dimasukkan ke dalam 4 (empat) wilayah kecamatan, yaitu Pangkalan Kuras, Langgam, Bunut dan Kuala Kampar, semasa wilayah ini masih berada dalam kawasan Kabupaten Kampar. Dengan dibukanya perkebunan besar seperti perkebun sawit swasta dan nasional serta hak-hak yang diberikan pemerintah pada pengusaha dalam memanfaatkan hasil hutan, terjadilah awal perubahan yang berakibat pada eksistensi hak ulayat masyarakat. Dengan dibukakannya usaha besar ini telah membawa pengaruh besar terhadap masyarakat hukum adat.

Hak-hak mereka atas tanah yang semula dijadikan sebagai sumber ekonomi dan jaminan kelangsungan hidup generasi berikutnya, kenyataannya sudah berubah. Dalam perkembangan yang ada ternyata keberadaan masyarakat hukum adat mengalami reformasi bahkan revolusi yang berakibat terjadinya berbagai permasalahan yang ada. Jika disikapi bahwa akar permasalahan ini berawal dari adanya kekuatan yang tidak seimbang, melebihi kekuatan yang ada pada masyarakat adat yang bercirikan kebersamaan, kekeluargaan, sedangkan disisi lain terdapatnya imperium swasta (multi and national corporation) dan negara nasional yang diperkuat oleh entitas politik pemerintahan yang dilengkapi dengan kekuasaan lembaga negara sebagai pendukungnya. Bahkan terlihat tidak adanya jaminan di dalam negara nasional akan mendapat pengakuan, penghormatan serta perlindungan yang lebih baik dari masa sebelumnya.

B. Profil Desa Lubuk Terap

Desa Lubuk Terap Merupakan salah Satu Desa didalam bidang pertanian dilihat dari mayoritas mata pencarian penduduknya sepertipetani karet, sawit, jagung dan hal tani lainnya. Dapat disimpulkan bahwa desa ini sudah termasuk desa yang mengalami kemajuan cukup besar halini didorong dengan adanya beberapa mini market, indomart dan laundry baju tidak lupa juga segi kemasyarakatan pemuda dari Desa Lubuk Terap. Penduduk Desa Lubuk Terap ini terdiri dari berbagai macam agama mulai dari islam (mayoritas) diikuti kristen dan khatolik.

Kondisi yang ada di Desa Lubuk Terap :

1. Aparatur Desa
 - Kepala Desa : Darusman
 - Sekretaris Desa : Yudi Oktarizal.SH
 - Kepala Urusan
 - Kaur Pemerintahan : Winda Prasetio H.A
 - Kaur Keuangan : Asnidar
 - Kaur Perencanaan : Syafarudin
2. Kepala Dusun Simundam Utara : Syam Rafa'i
 - Ketua RW 001 : Khaidir
 - Ketua RT 001 : Syamrafa'i
 - Ketua RT 002 : K.Sihombing
 - Ketua RW 002 : Syamsir Syam
 - Ketua RT 003 : Muis
 - Ketua RT 004 : Zakarya

Ketua RT 005 : Musa
3. Kepala Dusun Simundam Selatan : Zulkarnaidi

- Ketua RW 001 : Amansyah
- Ketua RT 001 : Darwis
- Ketua RT 002 : Basin
- Ketua RW 003 : A.Bakar
- Ketua RT 003 : Alfis Nor
- Ketua RT 004 : Suasono
- Ketua RT 005 : ABD. Rahman
- Ketua RT 006 : Darmawin

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Ketua : Mukhtar,S.Pd
- Anggota : Zainal Hapidin,S.Pd
- Anggota : Sumiati Sipun,S.Pd
- Anggota : Tauhid Harahap
- Anggota : Yulianis AR.Amd

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD)

- Ketua : Sunardinata
- Anggota : M. Yusuf
- Anggota : M. Nur
- Anggota : Amirida
- Anggota : Darwis
- Anggota : Pairuscan
- Anggota : Edy Syaputra
- Anggota : Mardiyanto
- Anggota : Tuti Handayani
- Anggota : M. Saril

2. Luas Wilayah

- Jarak Tempuh
 - Desa ke Ibu Kota Kecamatan : 2km
 - Desa ke Ibu Kota Kabupaten : 46km
 - Desa ke Ibu Kota Provinsi : 117km
- Transportasi
 - Jalan Negara : 2km
 - Jalan Provinsi : -
 - Jalan Kabupaten : 3km
 - Jalan Lingkung : 12km
- Luas Wilayah Lubuk Terap : 611 Ha
 - Pemukiman : 213 Ha
 - Perkebunan dan Pertanian : 398 Ha
 - Lahan Tidur : -
 - Tanah Rawa : -
 - Tanah darat : -
 - Tanah sungai : -

3. Batas Wilayah

- Utara berbatasan dengan kelurahan sorek satu kecamatan pangkalan kuras dan desa angkasa
- Timur berbatasan dengan PT. Serikat Putra dan Kelurahan Rawang empat
- Selatan berbatasan dengan desa kuala semundam

- Barat berbatasan dengan kelurahan sorek satu kecamatan pangkalan kuras

4. Kependudukan

- Jumlah Penduduk Desa : 1381 jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : 356 KK
- Jumlah penduduk beragama Islam : 1352
- Jumlah penduduk non muslim : 29
- Jumlah Penduduk Laki-laki : 725
- Jumlah Penduduk Perempuan : 656

3. Struktur di Kantor Desa Lubuk Terap

Tabel IV.1 : Struktur Pegawai Kantor Desa Lubuk Terap

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|--------------------|------------------------|
| 1 | DARUSMAN | KEPALA DESA |
| 2 | YUDI OKTARIZAL,SH | SEKRETARIS DESA |
| 3 | ASNIDAR | KAUR KEUANGAN |
| 4 | SYARIFUDIN | KAUR PERENCANAAN |
| 5 | WINDA PRASETIO H.A | KAUR PEMERINTAHAN |
| 6 | YAN SAHLAN | KAUR PELAYANAN |
| 7 | SYAM RAFA'I | KADUS SIMUNDAM UTARA |
| 8 | ZULKARNAIDI | KADUS SIMUNDAM SELATAN |

Sumber: Kantor Kepala Desa Lubuk Terap,2017

Tugas pegawai kantor kepala desa lubuk terap :

1. Kepala Desa

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- Mengajukan rancangan peraturan desa
- Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan
- Membina kehidupan masyarakat desa
- Membina perekonomian desa

2. Sekretaris Desa

- Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa
- Membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- Melaksanakan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa
- Melaksanakan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran

3. Kaur Keuangan

Tugas kaur keuangan adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Maka tugas kaur keuangan jauh lebih detail dan teknis dalam penanganan masalah keuangan desa.

Kaur keuangan lah yang bertugas melakukan berbagai pembayaran yang harus dilakukan desa terhadap berbagai pihak dalam rangka menjalankan proses pembangunan. Misalnya, pembayaran pada proyek-proyek yang bersumber dari dana desa. Kaur keuangan lah yang bertanggung jawab melakukan transaksi ke bank, melakukan pencatatan dan membuat laporan secara berkala berikut bukti-bukti transaksi yang ada.

4. Kaur Perencanaan

- Menyusun cara kerja tindak lanjut program dan kegiatan kaur perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kerja.
- Mempersiapkan bahan-bahan dan materi serta menyusun rencana kebutuhan kebijakan teknis dibidang perencanaan.
- Mengelola dan mengarsipkan dokumen, perencanaan yaitu RPJMDesa dan RKP Desa, serta dokumen laporan kegiatan pemerintah desa semester dan tahunan.
- Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan realisasi APBDesa semester dan tahunan.

5. Kaur pemerintahan

Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

- Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan

- Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
 - Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa
 - Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Kaur Pelayanan
- Berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis bidang pelayanan
 - Bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pelayanan
 - Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban masyarakat desa
 - Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa
 - Melaksanakan pelestarian nilai sosial budayamasyarakat
7. Kepala Dusun
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
 - Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
 - Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dan meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
 - Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.